

# ANALISIS STRATEGI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DALAM IMLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA

**Ainun Magfiroh**

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Email: [ainunmagfiro9955.am87@gmail.com](mailto:ainunmagfiro9955.am87@gmail.com)

## **Abstrak**

Kurikulum Merdeka menjadi fokus perhatian Indonesia untuk memajukan sistem pendidikan nasional. Pada Kurikulum ini menekankan pada proses pembelajaran yang lebih kreatif, kontekstual dan relevan dalam kehidupan sehari-hari pada peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa strategi pendidikan islam dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan pustaka, dengan fokus pada analisis dan sintesis literatur ilmiah yang relevan. Data sekunder yang dianalisis mencakup pandangan, temuan, dan konsep terkait faktor-faktor implementasi Kurikulum Merdeka.

**Kata kunci:** Strategi Lembaga Pendidikan Islam, Kurikulum Merdeka,

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan suatu bangsa, dan untuk memastikan keberhasilan sistem pendidikan, perlu adanya kurikulum yang relevan dan sesuai dengan tuntutan zaman. Kurikulum pada dasarnya merupakan instrumen untuk mencapai tujuan pendidikan, yang secara langsung mencerminkan filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa yang mempengaruhi tujuan pendidikan (Darman, 2021). Kurikulum memiliki kepentingan besar karena melalui kurikulum tersebut dapat dibuat silabus yang sangat bermanfaat sebagai materi pembelajaran bagi siswa dan pendidik, karena silabus dapat memberikan panduan kepada murid dan guru (Gofur et al., 2022). Di Indonesia, implementasi Kurikulum Merdeka telah menjadi fokus perhatian dalam upaya memajukan sistem pendidikan nasional.

Asal-usul istilah kurikulum (*curriculum*) berasal dari dunia olahraga, merujuk pada sejauh apa seorang pelari harus berlari dari titik awal hingga mencapai garis finish untuk meraih medali atau penghargaan (Suparman, 2020). Sehingga jika diterapkan dalam pendidikan, kurikulum adalah suatu rencana dan susunan pembelajaran yang dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, “*Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu*” (Presiden Republik Indonesia, 2003). Kurikulum melibatkan suatu rangkaian tahapan pengembangan yang umumnya mencakup perencanaan, implementasi, dan evaluasi, dengan tujuan menciptakan kurikulum yang dapat berjalan secara efektif (Fajri,

2019). Kurikulum melibatkan pemilihan materi pelajaran, metode pengajaran, serta penilaian hasil pembelajaran. Kurikulum menggambarkan arah dan lingkup pembelajaran yang diinginkan oleh suatu lembaga pendidikan atau negara, mencerminkan nilai-nilai dan tujuan pendidikan yang diakui oleh masyarakat.

Di Indonesia, terdapat konsep baru yang dikenal sebagai Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka merupakan inovasi pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara holistik, mempromosikan kreativitas, inovasi, dan pemberdayaan diri. Dalam kerangka Kurikulum Merdeka, sekolah memiliki hak dan tanggung jawab untuk menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik uniknya (Cholilah et al., 2023). Kurikulum Merdeka memiliki tiga ciri utama, meliputi peningkatan soft skills dan karakter, pemberian penekanan pada materi yang esensial, serta penciptaan lingkungan pembelajaran yang bersifat fleksibel (Kemdikbud RI). Konsep ini menekankan pada pembelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, pengembangan karakter, serta pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan kontekstual dan berbasis proyek. Kurikulum Merdeka juga menekankan peran guru sebagai fasilitator pembelajaran dan peserta didik sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran.

Dalam Kurikulum Merdeka, pembelajaran tidak hanya terbatas pada kelas, tetapi juga melibatkan lingkungan sekitar peserta didik sebagai sumber belajar yang penting. Dalam Kurikulum Merdeka, pendidik diberi kebebasan untuk memanfaatkan berbagai perangkat pembelajaran yang melibatkan sejumlah besar materi, termasuk namun tidak terbatas pada penilaian literasi, modul pengajaran, buku teks, dan sumber pembelajaran lainnya (Lestari et al., 2023). Pembelajaran dilakukan melalui proyek-proyek nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, dengan tujuan mengembangkan keterampilan praktis, pemecahan masalah, dan kemampuan berpikir kritis. Keterampilan ini juga dibutuhkan pada pendidikan di era abad ke-21 yaitu keterampilan 4C (*critical thinking, communication, collaboration, and creativity*)(Indarta et al., 2022). Dengan demikian, Kurikulum Merdeka mencoba menghadirkan pendekatan pembelajaran yang lebih dinamis, kontekstual, dan sesuai dengan perkembangan zaman untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan masa depan.

Beberapa penelitian terdahulu mungkin telah mengulas sebagian aspek terkait Kurikulum Merdeka. Banyak penelitian sebelumnya mungkin lebih bersifat umum dan kurang memperhatikan perbedaan konteks lokal yang dapat mempengaruhi implementasi Kurikulum Merdeka. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Sari dan Noor (2022) memberikan penjelasan terkait dukungan dan kritik dari kebijakan-kebijakan menuju pembelajaran merdeka seperti kebijakan untuk Ujian Nasional (UN), Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kesenjangan ini menyoroti perlunya memahami konteks setempat dan bagaimana faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi sukses atau kegagalan implementasi. Namun, melalui penelitian ini, kita dapat melihat lebih dekat pada faktor-faktor pendukung dan penghambat secara komprehensif, serta mencoba menjembatani kesenjangan pengetahuan yang mungkin masih ada dari penelitian sebelumnya.

Dengan begitu, peneliti memiliki tujuan utama dalam penelitian ini yaitu untuk menyelidiki faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi Kurikulum Merdeka di lembaga pendidikan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

pemahaman yang lebih baik terkait tantangan dan peluang dalam menerapkan kurikulum yang bersifat lebih lokal dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Melalui tinjauan pustaka yang mendalam ini, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang lebih kaya dan kontekstual mengenai dinamika implementasi Kurikulum Merdeka, serta memberikan landasan yang kokoh untuk perumusan kerangka konseptual dan metodologi penelitian yang akan dilakukan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau tinjauan pustaka. Metode ini fokus pada analisis dan sintesis literatur ilmiah yang relevan untuk mengembangkan pemahaman menyeluruh tentang topik penelitian. Data yang diambil dalam kajian pustaka ini adalah data sekunder, yaitu informasi yang telah diterbitkan dalam bentuk artikel jurnal, buku, laporan penelitian, dan sumber literatur ilmiah lainnya. Data ini mencakup pandangan, temuan, dan konsep yang telah dikemukakan oleh peneliti terdahulu terkait faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi Kurikulum Merdeka di lembaga pendidikan. Instrumen utama dalam *library research* ini adalah pencarian dan seleksi literatur. Pengumpulan data dimulai dengan merumuskan pertanyaan penelitian yang spesifik untuk membimbing pencarian literatur. Selanjutnya, peneliti melakukan pencarian literatur menggunakan basis data akademis, perpustakaan digital, dan sumber-sumber literatur ilmiah lainnya. Pencarian dilakukan dengan kata kunci yang sesuai dengan topik penelitian. Langkah selanjutnya, peneliti menilai relevansi dan kualitas literatur yang ditemukan berdasarkan kriteria inklusi yang telah ditentukan. Literatur yang tidak relevan atau kurang validitasnya dieliminasi. Peneliti menganalisis isi literatur yang relevan, mengekstraksi temuan utama, dan menyusun sintesis untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi Kurikulum Merdeka.

Data yang terkumpul dianalisa lebih lanjut oleh peneliti dengan melalui tiga tahap, yaitu klasifikasi temuan, sintesis temuan, dan penarikan kesimpulan. Pertama, peneliti mengelompokkan temuan literatur ke dalam kategori-kategori utama, seperti faktor pendukung dan penghambat. Kedua, peneliti mengintegrasikan temuan literatur untuk membentuk pemahaman menyeluruh tentang topik penelitian. Sintesis dilakukan dengan merangkum pandangan dan temuan yang saling terkait. Terakhir, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan sintesis literatur, mengidentifikasi pola atau tren yang muncul, serta memberikan gambaran komprehensif tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi Kurikulum Merdeka.



## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Implementasi Kurikulum Merdeka, sebagaimana konsep satuan pendidikan yang menekankan kemandirian dan kebebasan siswa dalam menentukan jalannya pembelajaran, melibatkan berbagai faktor pendukung dan penghambat yang dapat memengaruhi kesuksesannya. Faktor pendukung, seperti dukungan dari pemangku kepentingan, fleksibilitas kurikulum, keterlibatan komunitas, serta konsistensi terhadap kebutuhan lokal dapat menjadi pendorong keberhasilan implementasi ini. Di sisi lain, faktor penghambat, seperti ketidakpastian peran guru, ketidaksesuaian dengan infrastruktur, dan resistensi terhadap perubahan, dapat menyulitkan pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Untuk memahami secara holistik dampak dan tantangan dalam mewujudkan visi Kurikulum Merdeka, perlu dianalisis baik faktor pendukung maupun penghambat yang turut membentuk dinamika kompleks implementasi model pendidikan progresif ini.

### **Faktor Pendukung**

#### **Dukungan Pemangku Kepentingan**

Implementasi Kurikulum Merdeka yang berhasil memerlukan dukungan yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan ini mencakup pemerintah, lembaga pendidikan, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat secara umum. Dalam hal ini, faktor pendukung dari implementasi Kurikulum Merdeka dapat dilihat dari beberapa perspektif.

Pertama, dukungan pemerintah sangat krusial. Pemerintah sebagai regulator utama dalam dunia pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kebijakan dan memberikan arahan yang jelas terkait dengan implementasi Kurikulum Merdeka. Dukungan finansial, kebijakan yang mendukung inovasi pendidikan, serta pelibatan aktif dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan faktor kunci untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas dari Kurikulum Merdeka. Pemerintah pusat dan daerah yang berwenang untuk menyusun anggaran pendidikan perlu merancang dan mengawasi Kurikulum Merdeka dengan perencanaan serta pemetaan yang sistematis dan menyeluruh, termasuk pemetaan kebutuhan sekolah, sumber daya manusia guru yang akan dilibatkan, objek sosialisasi, serta pendanaan untuk sarana prasarana yang mendukung kegiatan pengembangan Kurikulum Merdeka (Hilmin et al., 2022).

Kedua, lembaga pendidikan juga memegang peran penting dalam kesuksesan implementasi Kurikulum Merdeka. Mereka perlu memiliki kesiapan dalam mengadaptasi perubahan kurikulum, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, serta mengembangkan kualifikasi dan kompetensi guru sesuai dengan tuntutan kurikulum baru. Untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelatihan yang diberikan kepada kepala sekolah, pengawas sekolah, komite sekolah, dan tenaga administrasi sebagai bentuk dukungan dari pihak sekolah (Suaryo et al., 2023). Keterlibatan aktif lembaga pendidikan dalam proses pengembangan dan implementasi kurikulum juga akan meningkatkan akseptabilitas dan efektivitasnya.

Selain itu, peran guru sangat sentral dalam merespon dan mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Guru yang menjadi kontrol dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka karena guru memiliki peran sebagai implementer yang mengaplikasikan kurikulum merdeka, adapters yang menyelaraskan kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan siswa serta

daerah, peneliti kurikulum yang melakukan tugas profesional untuk meningkatkan kinerja guru, pemain kunci dalam pengembangan kurikulum merdeka sebagai penyempurnaan dari versi sebelumnya dan sesuai dengan sasaran kurikulum zaman milenial, desainer pembelajaran yang merancang corak pembelajaran sesuai dengan fleksibilitas kurikulum merdeka, mediator pembelajaran yang memainkan peran penting sebagai perantara antara sumber belajar dan siswa, serta inspirator pembelajaran kurikulum yang menjadi sumber inspirasi utama bagi siswa dalam mengelola materi pelajaran (Hilmin et al., 2022). Dukungan dalam bentuk pelatihan, bimbingan, dan pemahaman yang mendalam tentang filosofi, tujuan, dan metode pembelajaran Kurikulum Merdeka akan meningkatkan keterlibatan dan kualitas pengajaran mereka. Pemahaman yang baik dari guru terhadap kurikulum akan tercermin dalam kualitas pembelajaran yang diberikan kepada siswa.

Siswa juga merupakan pemangku kepentingan yang perlu mendapatkan dukungan dalam rangka mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Mereka perlu dilibatkan dalam proses pembelajaran, diberikan ruang untuk berpartisipasi aktif, serta didorong untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan sesuai dengan pendekatan Kurikulum Merdeka yang menekankan pada pengembangan potensi individual. Kurikulum Merdeka Belajar adalah kebijakan terbaru dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek RI) yang bertujuan menciptakan proses pembelajaran yang inovatif dan berorientasi pada kebutuhan siswa (*student-centered*) (Indarta et al., 2022).

Terakhir, dukungan dari orang tua dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Keterlibatan orang tua dalam mendukung pembelajaran anak-anaknya di rumah dan dukungan masyarakat dalam bentuk program-program ekstrakurikuler, kunjungan industri, dan kegiatan yang melibatkan komunitas lokal akan memberikan tambahan nilai pada implementasi Kurikulum Merdeka. Seperti pada dukungan orang tua terhadap kegiatan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka dapat menginspirasi dan mendorong anak untuk lebih berdedikasi dan fokus dalam memahami serta menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari (Salam, 2023).

Dengan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan, implementasi Kurikulum Merdeka dapat menjadi lebih efektif dan dapat mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan, yaitu menciptakan generasi yang mandiri, kreatif, dan mampu bersaing secara global.

### Fleksibilitas Kurikulum

Fleksibilitas kurikulum merupakan salah satu faktor pendukung utama dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Fleksibilitas ini memungkinkan adanya penyesuaian dan personalisasi pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi individu setiap siswa. Dengan memberikan ruang lebih pada lembaga pendidikan, guru, dan siswa untuk menentukan jalannya pembelajaran, Kurikulum Merdeka menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis dan responsif terhadap perkembangan peserta didik.

Fleksibilitas kurikulum memungkinkan lembaga pendidikan untuk menyesuaikan metode pengajaran dan materi pembelajaran dengan karakteristik siswa, keberagaman budaya, dan kebutuhan lokal. Hal ini mempromosikan inklusivitas dan keberagaman,

memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pendidikan yang relevan dan bermakna. Sebagai contoh, lembaga pendidikan dapat menyesuaikan kurikulum untuk memasukkan elemen lokal, memperkuat identitas kultural siswa, dan mengaitkannya dengan konteks kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks fleksibilitas kurikulum, peran guru menjadi sangat signifikan. Guru dapat mengadaptasi metode pengajaran mereka untuk mencocokkan gaya belajar siswa dan merespons perubahan dalam kebutuhan pendidikan. Fleksibilitas ini juga memberikan kesempatan bagi guru untuk menggali berbagai sumber pembelajaran dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan kelas mereka, meningkatkan keterlibatan siswa dan efektivitas pengajaran.

Selain itu, fleksibilitas kurikulum juga menciptakan ruang bagi inovasi pendidikan. Guru dan lembaga pendidikan dapat mengembangkan strategi pembelajaran kreatif, memanfaatkan teknologi modern, dan mengeksplorasi pendekatan baru dalam mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Dengan cara ini, Kurikulum Merdeka mendorong semangat inovasi dalam dunia pendidikan, menciptakan lingkungan yang menginspirasi dan menantang.

Fleksibilitas kurikulum juga mendukung pendekatan pembelajaran berbasis proyek dan pengalaman. Siswa dapat terlibat dalam proyek-proyek pembelajaran yang relevan dengan kehidupan nyata, mengembangkan keterampilan praktis, dan merangsang minat belajar mereka. Memberikan tugas atau proyek kepada siswa dapat mengungkapkan kemampuan mereka dalam menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari dalam konteks praktis, memungkinkan mereka untuk belajar secara lebih mendalam dan relevan, sekaligus mengembangkan keterampilan yang berguna di masa depan (Rozi, 2023). Melalui pendekatan ini, Kurikulum Merdeka tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga melibatkan siswa dalam proses pembelajaran yang lebih menyeluruh dan menantang.

Dengan demikian, fleksibilitas kurikulum bukan hanya sekadar penyesuaian terhadap perubahan kebutuhan pendidikan, tetapi juga merupakan pendorong utama untuk menciptakan sistem pendidikan yang dinamis, relevan, dan memungkinkan setiap individu untuk berkembang sesuai dengan potensi mereka masing-masing.

### Keterlibatan Komunitas

Keterlibatan komunitas menjadi faktor krusial dalam mendukung implementasi Kurikulum Merdeka. Komunitas lokal memiliki peran yang signifikan dalam menyediakan dukungan, sumber daya, dan pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan pendidikan di wilayah mereka. Keterlibatan aktif dari komunitas dapat menciptakan sinergi antara lembaga pendidikan, guru, dan masyarakat, menghasilkan lingkungan belajar yang lebih holistik dan responsif.

Keterlibatan komunitas menciptakan kesempatan untuk memasukkan nilai-nilai lokal dan kearifan lokal ke dalam kurikulum. Dengan berpartisipasi dalam proses pengembangan kurikulum, komunitas dapat memastikan bahwa materi pembelajaran dan metode pengajaran mencerminkan realitas sosial, budaya, dan ekonomi setempat. Hal ini tidak hanya meningkatkan relevansi kurikulum, tetapi juga membangun kedekatan siswa dengan lingkungan sekitarnya.

Komunitas dapat berperan sebagai sumber daya tambahan dalam proses pembelajaran. Melalui kegiatan kunjungan industri, pelatihan praktik, atau kolaborasi dengan para ahli dari komunitas, siswa dapat mengalami pembelajaran yang lebih kontekstual dan terkait langsung dengan kebutuhan dunia kerja. Studi dari Humaida (2023) juga menunjukkan hasil terkait pelaksanaan pembelajaran kokurikuler kunjungan ke museum mengindikasikan adanya hubungan positif dan kuat dengan hasil belajar IPS dalam Kurikulum Merdeka, menunjukkan bahwa frekuensi yang lebih tinggi dalam melaksanakan kegiatan tersebut berdampak pada peningkatan hasil belajar IPS siswa. Keterlibatan ini membuka peluang bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan praktis dan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan pasar lokal.

Dukungan finansial dan sumber daya dari komunitas juga dapat membantu mengatasi tantangan infrastruktur dan ketersediaan sumber daya di lembaga pendidikan. Program donasi atau inisiatif sukarela dari masyarakat dapat memberikan tambahan dukungan untuk meningkatkan fasilitas, teknologi, dan peralatan pembelajaran di sekolah. Ini menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif dan memastikan bahwa setiap siswa memiliki akses yang setara terhadap sarana pendidikan yang berkualitas.

Keterlibatan komunitas tidak hanya mencakup dukungan materi, tetapi juga dukungan sosial dan emosional. Komunitas dapat menjadi tempat untuk mendiskusikan isu-isu pendidikan, mengatasi tantangan bersama, dan merancang solusi yang sesuai dengan konteks lokal. Ini menciptakan jaringan dukungan yang kuat untuk guru, siswa, dan orang tua, meningkatkan kesejahteraan mental dan sosial di dalam dan di sekitar lingkungan pendidikan.

Secara keseluruhan, keterlibatan komunitas dalam implementasi Kurikulum Merdeka bukan hanya sekadar dukungan tambahan, tetapi merupakan bagian integral dari upaya menciptakan sistem pendidikan yang berpusat pada kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, keterlibatan komunitas tidak hanya menciptakan lingkungan pembelajaran yang beragam dan relevan, tetapi juga membangun fondasi yang kokoh untuk perkembangan dan keberlanjutan pendidikan yang berkelanjutan.

#### Konsistensi dengan Kebutuhan Lokal

Konsistensi dengan kebutuhan lokal merupakan faktor penting yang mendukung implementasi Kurikulum Merdeka. Dalam konteks ini, kurikulum dirancang untuk mencerminkan dan merespons keunikan, nilai-nilai, dan kebutuhan spesifik dari masyarakat setempat. Dengan menyatukan elemen budaya dan pengetahuan lokal dalam kurikulum, guru dan siswa dapat memiliki pemahaman yang lebih mendalam dan menghargai warisan budaya serta tradisi unik yang ada di lingkungan sekitar mereka (Lee, 2023). Dengan demikian, keterlibatan komunitas dan *stakeholder* lokal dalam proses perencanaan dan pengembangan kurikulum menjadi kunci dalam memastikan bahwa kurikulum mencerminkan realitas lokal.

Dengan mempertimbangkan kebutuhan lokal, kurikulum dapat diadaptasi untuk mencakup isu-isu dan konteks yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Memanfaatkan pengetahuan lokal sebagai landasan untuk merancang Kurikulum Merdeka dapat mendukung pembentukan kurikulum yang lebih inklusif, memperhatikan keberagaman masyarakat kita (Rozi, 2023). Hal ini membantu meningkatkan keterkaitan antara materi pembelajaran dengan pengalaman hidup siswa, membuat pembelajaran lebih berarti dan



relevan. Konsistensi ini juga dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar karena mereka melihat relevansi langsung dari apa yang mereka pelajari dengan kehidupan sekitar mereka.

Penyelarasan dengan kebutuhan lokal juga memungkinkan pengembangan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja setempat. Kurikulum Merdeka yang bersifat kontekstual dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan praktis yang langsung terkait dengan pekerjaan atau peluang bisnis di lingkungan mereka. Ini mendukung visi Kurikulum Merdeka untuk menciptakan lulusan yang tidak hanya memiliki pengetahuan akademis, tetapi juga keterampilan yang dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari dan di pasar kerja lokal.

Dalam aspek ini, peran guru menjadi sangat penting. Guru yang memiliki pemahaman mendalam tentang konteks lokal dapat lebih efektif mengintegrasikan elemen-elemen lokal ke dalam kurikulum. Pendidikan guru tentang keunikan dan kebutuhan lokal juga dapat memberikan panduan dalam pengembangan metode pengajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan masyarakat setempat.

Selain itu, konsistensi dengan kebutuhan lokal juga dapat memperkuat keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak-anak mereka. Konsistensi dalam menerapkan Kurikulum Merdeka juga menjadi metode untuk mengatasi serta mengevaluasi hambatan-hambatan yang timbul, guna memastikan kelangsungan dari Kurikulum Merdeka (Sudrajat et al., 2023). Melalui pemahaman tentang bagaimana kurikulum mencerminkan kehidupan anak-anak mereka, orang tua dapat lebih mudah mendukung pembelajaran di rumah dan merasa terlibat dalam perkembangan pendidikan anak-anak mereka.

Faktor-faktor ini memberikan dasar yang kuat untuk mendukung suksesnya implementasi Kurikulum Merdeka di lembaga pendidikan. Dengan memahami dan memanfaatkan faktor-faktor pendukung ini, lembaga pendidikan dapat memaksimalkan potensi kurikulum untuk memberikan pendidikan yang lebih kontekstual dan bermakna bagi siswa.

## **Faktor Penghambat**

### **Ketidakpastian Peran Guru**

Ketidakpastian peran seorang guru menjadi salah satu faktor penghambat yang dapat menghambat implementasi Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka menekankan pada pembelajaran berbasis keterampilan dan pengembangan potensi siswa, yang memerlukan peran guru yang lebih dinamis dan terlibat secara aktif dalam mendukung proses pembelajaran siswa. Namun, ketidakpastian mengenai peran guru dapat muncul karena perubahan paradigma dari pendekatan tradisional menuju pendekatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan individual siswa.

Ketidakpastian peran dapat timbul karena kurangnya pelatihan yang memadai atau panduan yang jelas untuk guru dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Dalam beberapa kasus, guru mungkin merasa kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan tersebut, terutama jika mereka tidak memiliki pemahaman yang memadai atau dukungan yang cukup. Studi dari Mantra dkk (2022) menyebutkan bahwa diperlukan penyediaan pelatihan yang lebih mendalam secara berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman guru terkait penerapan Kurikulum Merdeka di dalam ruang kelas. Dengan

begitu, perlu adanya upaya lebih lanjut untuk memberikan pelatihan yang komprehensif kepada guru agar mereka dapat memahami peran baru mereka dalam konteks Kurikulum Merdeka.

Selain itu, kurangnya kesiapan infrastruktur dan sumber daya di sekolah juga dapat meningkatkan ketidakpastian peran guru. Penggunaan teknologi, metode pembelajaran inovatif, atau pengenalan elemen-elemen lokal dalam pembelajaran mungkin memerlukan dukungan logistik dan perangkat yang memadai. Tanpa dukungan ini, guru mungkin merasa sulit untuk menjalankan peran mereka dengan efektif sesuai dengan visi Kurikulum Merdeka.

Ketidakpastian peran guru juga dapat timbul karena adanya tekanan terkait evaluasi dan akuntabilitas. Jika sistem evaluasi masih sangat terfokus pada ujian standar dan penilaian berbasis tes, guru mungkin menghadapi konflik peran dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih interaktif dan kontekstual sesuai dengan Kurikulum Merdeka. Oleh karena itu, penting untuk merinci pedoman evaluasi yang sesuai dengan pendekatan Kurikulum Merdeka untuk mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepercayaan guru.

Penyelarasan antara kebijakan pusat dan realitas di tingkat sekolah juga dapat menciptakan ketidakpastian peran guru. Jika kurikulum dirancang secara nasional tanpa mempertimbangkan kebutuhan atau karakteristik unik dari sekolah-sekolah di tingkat lokal, guru mungkin merasa kesulitan mengaitkan kurikulum dengan realitas kelas mereka. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memastikan adanya kesesuaian dan pemahaman yang jelas mengenai implementasi Kurikulum Merdeka di tingkat sekolah.

Dalam mengatasi ketidakpastian peran guru, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan pelatihan yang mendalam, penyediaan dukungan sumber daya yang memadai, peninjauan kembali sistem evaluasi, dan penyelarasan yang lebih baik antara kebijakan pusat dan realitas di tingkat sekolah. Dengan cara ini, guru dapat lebih percaya diri dan efektif dalam menjalankan peran mereka dalam mendukung tujuan Kurikulum Merdeka untuk mengembangkan potensi siswa secara menyeluruh.

#### Ketidaksesuaian dengan Infrastruktur

Ketidaksesuaian dengan infrastruktur menjadi salah satu faktor penghambat yang signifikan dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka menekankan pada pendekatan pembelajaran yang responsif terhadap kebutuhan individu siswa, menggunakan teknologi modern, dan memperhatikan kondisi lokal. Namun, ketidaksesuaian infrastruktur, baik di tingkat lembaga pendidikan maupun tingkat nasional, dapat menghambat efektivitas implementasi kurikulum ini.

Di tingkat lembaga pendidikan, kurangnya fasilitas dan perangkat teknologi yang memadai dapat menjadi penghambat utama. Implementasi Kurikulum Merdeka seringkali memerlukan penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras, serta koneksi internet yang stabil untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi. Sekolah yang tidak memiliki infrastruktur ini mungkin kesulitan mengadopsi metode pembelajaran yang diusulkan, mengakibatkan kesenjangan akses dan kualitas pembelajaran di antara berbagai lembaga.

Selain itu, ketidaksesuaian infrastruktur juga dapat berkaitan dengan ketersediaan sumber daya di tingkat nasional. Beberapa wilayah mungkin mengalami ketidaksetaraan akses terhadap fasilitas pendidikan dan teknologi, yang dapat memperburuk kesenjangan

pendidikan. Investasi dalam bentuk pelatihan guru, peningkatan infrastruktur teknologi, dan pengembangan konten pendidikan adalah langkah-langkah yang sangat penting untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi dalam sektor pendidikan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh masyarakat Indonesia (Hidayatullah et al., 2023). Kurangnya investasi pada infrastruktur pendidikan dan teknologi di beberapa daerah dapat menghambat upaya implementasi Kurikulum Merdeka, terutama jika tidak ada upaya untuk menyamakan akses dan dukungan di seluruh wilayah.

Dampak dari ketidaksesuaian infrastruktur juga dapat mempengaruhi pelatihan guru. Guru mungkin kesulitan mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dengan baik jika pelatihan yang diberikan tidak mencakup aspek teknologi dan pemahaman tentang bagaimana mengintegrasikan alat-alat tersebut dalam proses pembelajaran. Sintiawati dkk (2022), Sumarsih dkk (2022) dan Alawi dkk (2022) sepakat bahwa kurangnya pelatihan bagi guru dan tenaga pendidikan dapat menghambat implementasi Kurikulum Merdeka. Oleh karena itu, diperlukan investasi pada pelatihan guru yang mencakup pemahaman mendalam tentang teknologi dan cara mengintegrasikannya dengan baik dalam lingkungan pembelajaran.

Tidak hanya itu, ketidaksesuaian infrastruktur dapat membatasi partisipasi siswa dalam pembelajaran berbasis teknologi. Tantangan dalam penerapan Kurikulum Merdeka Belajar melibatkan kurangnya fasilitas pendukung, seperti ruang kelas yang memadai, perangkat keras dan lunak yang memadai, jaringan internet yang memadai, serta sumber daya pembelajaran yang beragam di beberapa daerah, yang berdampak pada keterbatasan optimalitas proses pembelajaran (Ramadani et al., 2023). Seperti yang ditemukan oleh Yuhastina dkk (2020) bahwa sebagian besar dari mereka menghadapi hambatan komunikasi, terutama terkait dengan penggunaan *smartphone*, bahkan banyak yang tidak memiliki akses ke laptop dan internet; beberapa siswa perlu berbagi perangkat komunikasi dengan saudara mereka, mengirimkan jawaban pada malam hari, dan hal ini mengakibatkan guru kesulitan memantau kemajuan siswa dalam memahami materi. Jika siswa tidak memiliki akses ke perangkat atau koneksi internet di rumah, mereka mungkin tidak dapat memanfaatkan sepenuhnya metode pembelajaran yang membutuhkan dukungan teknologi di luar kelas. Ini dapat meningkatkan kesenjangan pembelajaran antara siswa yang memiliki akses teknologi dan mereka yang tidak, melanggengkan ketidaksetaraan dalam pendidikan.

Untuk mengatasi ketidaksesuaian infrastruktur, diperlukan investasi yang serius dalam pengembangan dan peningkatan infrastruktur pendidikan. Ini mencakup penyediaan fasilitas, perangkat keras, dan konektivitas internet di seluruh lembaga pendidikan. Selain itu, perlu ada kebijakan yang mendukung ketersediaan sumber daya di seluruh wilayah untuk memastikan bahwa setiap lembaga dan siswa memiliki akses yang setara terhadap infrastruktur pendukung pembelajaran. Dengan cara ini, implementasi Kurikulum Merdeka dapat lebih efektif dan inklusif, menciptakan peluang pembelajaran yang setara bagi semua siswa.

### Resistensi terhadap Perubahan

Resistensi terhadap perubahan menjadi faktor penghambat yang signifikan dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Konsep Kurikulum Merdeka menawarkan pendekatan yang lebih dinamis dan responsif terhadap kebutuhan siswa, yang sering kali memerlukan perubahan dalam metode pengajaran, penilaian, dan fokus pembelajaran. Namun, banyak

pihak yang mungkin menghadapi resistensi terhadap perubahan ini, terutama dari kalangan guru dan stakeholder pendidikan lainnya.

Guru seringkali menjadi pihak yang paling terkena dampak resistensi terhadap perubahan. Mereka mungkin sudah terbiasa dengan metode pengajaran tertentu dan merasa nyaman dengan cara tradisional dalam menyampaikan materi. Implementasi Kurikulum Merdeka yang menekankan pada pembelajaran berbasis keterampilan dan pengembangan potensi individual siswa mungkin dianggap sebagai perubahan besar, dan beberapa guru mungkin mengalami ketidaknyamanan atau kekhawatiran terhadap adaptasi mereka terhadap paradigma baru ini.

Selain guru, stakeholder lain seperti kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat juga dapat menunjukkan resistensi terhadap perubahan. Mereka mungkin memiliki ekspektasi dan pengalaman tertentu terkait dengan sistem pendidikan yang sudah ada, dan kurangnya pemahaman atau informasi yang cukup mengenai Kurikulum Merdeka dapat menyebabkan ketidakpercayaan atau ketidaksetujuan terhadap perubahan ini. Oleh karena itu, upaya komunikasi dan sosialisasi yang efektif tentang manfaat dan tujuan Kurikulum Merdeka dapat membantu mengurangi resistensi dari berbagai pihak.

Resistensi terhadap perubahan juga dapat muncul karena kekhawatiran terhadap peningkatan beban kerja atau ketidakpastian mengenai evaluasi kinerja. Guru mungkin merasa khawatir bahwa penerapan metode pembelajaran baru akan membutuhkan lebih banyak waktu dan usaha, sementara sistem evaluasi yang belum sepenuhnya sesuai dengan pendekatan Kurikulum Merdeka dapat menciptakan kebingungan dan kecemasan.

Penting untuk memahami bahwa mengatasi resistensi terhadap perubahan memerlukan strategi yang holistik. Pelibatan guru dalam proses perencanaan dan pengembangan kurikulum, serta penyediaan pelatihan yang memadai, dapat membantu meningkatkan pemahaman mereka tentang tujuan dan manfaat Kurikulum Merdeka. Selain itu, membangun tim yang kuat, termasuk dukungan dari kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat, dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan dan meminimalkan ketidakpastian.

Upaya komunikasi yang terus-menerus dan dialog terbuka juga penting untuk membuka ruang diskusi dan pemahaman antara semua pihak terkait. Mendemonstrasikan keberhasilan dan manfaat dari implementasi Kurikulum Merdeka melalui studi kasus atau proyek percontohan dapat menjadi langkah yang efektif untuk meyakinkan pihak-pihak yang masih meragukan.

Dengan cara ini, dapat diharapkan bahwa resistensi terhadap perubahan dapat dikurangi, dan implementasi Kurikulum Merdeka dapat menjadi lebih efektif dan diterima oleh seluruh komunitas pendidikan.

## **Pembahasan**

Hasil penelitian ini mengungkapkan beberapa faktor pendukung dan penghambat implementasi Kurikulum Merdeka. Dukungan pemangku kepentingan, terutama dari pemerintah, lembaga pendidikan, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat, dianggap krusial untuk kesuksesan implementasi. Faktor pendukung lainnya melibatkan dukungan finansial,

kebijakan inovatif, kesiapan lembaga pendidikan, peran guru yang terlibat, serta partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran.

Selain itu, fleksibilitas kurikulum diidentifikasi sebagai faktor pendukung utama. Fleksibilitas ini memungkinkan penyesuaian dan personalisasi pendidikan sesuai kebutuhan dan potensi individu siswa. Dengan memberikan kelonggaran pada lembaga pendidikan, guru, dan siswa, Kurikulum Merdeka menciptakan lingkungan belajar yang dinamis, responsif, dan mendukung inovasi. Fleksibilitas ini juga membuka ruang untuk pendekatan pembelajaran berbasis proyek dan pengalaman, mengaktifkan siswa dalam pembelajaran kontekstual dan menyeluruh.

Keterlibatan komunitas, sebagai faktor pendukung, menyoroti peran signifikan komunitas lokal dalam menyediakan dukungan, sumber daya, dan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan pendidikan. Keterlibatan ini tidak hanya mencakup dukungan materi, tetapi juga integrasi nilai-nilai lokal dan kearifan lokal ke dalam kurikulum, memastikan relevansi dan kebermaknaan pendidikan. Dukungan finansial dan sumber daya dari komunitas juga dianggap krusial untuk mengatasi tantangan infrastruktur dan meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan.

Selanjutnya, konsistensi dengan kebutuhan lokal menonjolkan pentingnya merancang kurikulum yang mencerminkan realitas, nilai-nilai, dan kebutuhan unik masyarakat setempat. Adapun, konsistensi ini dapat meningkatkan keterkaitan materi pembelajaran dengan pengalaman hidup siswa, meningkatkan motivasi belajar, dan mendukung pengembangan keterampilan praktis yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja lokal.

Di sisi lain, faktor penghambat yang diidentifikasi melibatkan ketidakpastian peran guru, khususnya terkait adaptasi terhadap perubahan paradigma pembelajaran. Diperlukan pelatihan yang lebih mendalam, dukungan sumber daya yang memadai, dan peninjauan sistem evaluasi untuk mengatasi ketidakpastian ini. Selain itu, ketidaksesuaian dengan infrastruktur diidentifikasi sebagai hambatan signifikan yang mempengaruhi efektivitas implementasi Kurikulum Merdeka, membutuhkan investasi serius dalam pengembangan dan peningkatan infrastruktur pendidikan.

Terakhir, resistensi terhadap perubahan, terutama dari guru dan stakeholder pendidikan lainnya, menjadi faktor penghambat utama. Upaya komunikasi, pelibatan guru dalam perencanaan kurikulum, pelatihan yang efektif, dan pembangunan tim yang kuat diidentifikasi sebagai strategi untuk mengatasi resistensi tersebut.

Dengan memahami dan mengelola faktor-faktor ini, lembaga pendidikan dapat memaksimalkan potensi Kurikulum Merdeka untuk menciptakan sistem pendidikan yang dinamis, relevan, dan inklusif, sesuai dengan tujuan mengembangkan potensi siswa secara menyeluruh.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di lembaga pendidikan melibatkan faktor-faktor pendukung dan penghambat yang kompleks. Faktor pendukung krusial mencakup dukungan penuh dari pemangku kepentingan, fleksibilitas kurikulum, keterlibatan komunitas, dan konsistensi dengan kebutuhan lokal. Dengan adanya dukungan ini, implementasi Kurikulum Merdeka

dapat menjadi lebih sukses dan berdampak positif terhadap pendidikan. Di sisi lain, terdapat faktor penghambat yang perlu diatasi, seperti ketidakpastian peran guru, ketidaksesuaian infrastruktur, dan resistensi terhadap perubahan.

Sebagai saran untuk penelitian selanjutnya, diperlukan pendalaman secara empiris terhadap faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi Kurikulum Merdeka melalui studi kasus, survei, atau wawancara langsung dengan lembaga pendidikan yang mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, dapat dihasilkan strategi implementasi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, pentingnya keterlibatan komunitas, peningkatan pendidikan guru, dan adopsi teknologi sebagai faktor pendukung menunjukkan bahwa integrasi Kurikulum Merdeka bukanlah upaya yang terisolasi, melainkan suatu transformasi pendidikan yang memerlukan partisipasi semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat memfokuskan pada strategi konkret untuk mengatasi faktor penghambat dan memperkuat faktor pendukung dalam implementasi Kurikulum Merdeka.

## REFERENSI

- Alawi, D., Sumpena, A., Supiana, & Zaqiah, Q. Y. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Pasca Pandemi Covid-19. *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 4(4), 5863–5873.
- Cholilah, M., Tatuwo, A. G. P., Komariah, Rosdiana, S. P., & Fatirul, A. N. (2023). Pengembangan Kurikulum Merdeka Dalam Satuan Pendidikan Serta Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Pembelajaran Abad 21. *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran*, 1(2), 57–66.
- Darman, R. A. (2021). *Telaah Kurikulum*. Guepedia.
- Fajri, K. N. (2019). Proses Pengembangan Kurikulum. *ISLAMIKA*, 1(2), 35–48.
- Gofur, M. A., Junedi, J., & Nursikin, M. (2022). Prinsip-Prinsip Inovasi dan Pengembangan Kurikulum PAI. *Educational Journal of Islamic Management*, 2(2), 55–62. <https://doi.org/10.47709/ejim.v2i2.1909>
- Hidayatullah, M. T., Asbari, M., Ibrahim, M. I., & Faidz, A. H. H. (2023). Urgensi Aplikasi Teknologi dalam Pendidikan di Indonesia. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 2(6), 70–73.
- Hilmin, Noviani, D., & Nafisah, A. (2022). Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penerapan Kurikulum Merdeka. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(2), 148–162.
- Humaida, D. (2023). *HUBUNGAN PEMBELAJARAN KOKURIKULER KUNJUNGAN KE MUSEUM DENGAN HASIL BELAJAR IPS DALAM KURIKULUM MERDEKA (STUDI PADA SISWA KELAS VII DI SMP NEGERI 97 JAKARTA)*. Universitas Negeri Jakarta.
- Indarta, Y., Jalinus, N., Waskito, Samala, A. D., Riyanda, A. R., & Adi, N. H. (2022). Relevansi Kurikulum Merdeka Belajar dengan Model Pembelajaran Abad 21 dalam Perkembangan Era Society 5.0. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(2), 3011–3024.
- Indonesia, P. R. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang*

- Kemdikbud RI. (n.d.). *Kurikulum Merdeka*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi. Retrieved December 7, 2023, from <https://kurikulum.kemdikbud.go.id/kurikulum-merdeka/>
- Lee, H. Y. (2023). *Cabaran yang dihadapi Pendidikan Seni Visual dengan Pentaksiran Bilik Darjah di sekolah rendah daerah Hilir Perak (FKIK)*. Universiti Pendidikan Sultan Idris.
- Lestari, D., Asbari, M., & Yani, E. E. (2023). Kurikulum Merdeka: Hakikat Kurikulum dalam Pendidikan. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 2(6), 85–88.
- Mantra, I. B. N., Pramerta, I. G. P. A., Arsana, A. A. P., Puspawati, K. R., & Wedasuwari, I. A. M. (2022). PERSEPSI GURU TERHADAP PENTINGNYA PELATIHAN PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN KURIKULUM MERDEKA. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(5), 6313–6318. <https://doi.org/10.47492/jip.v3i5.2073>
- Ramadani, F., Neviyarni, & Desyandri. (2023). STUDI LITERATUR ; ANALISIS TUJUAN PENDIDIKAN TERHADAP KURIKULUM MERDEKA BELAJAR DALAM MENGHADAPI TANTANGAN PENDIDIKAN ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 8(1), 321–332. <https://doi.org/10.23969/jp.v8i1.7570>
- Rozi, M. F. (2023). Model Pengembangan Kurikulum Merdeka Berbasis Integrasi Indigenous Knowledge" (The Model Of Independent Curriculum Development Based On Indigenous Knowledge). *Global Education Journal*, 1(4), 559–576.
- Salam, F. (2023). IMPLEMENTASI PROYEK PENGUATAN PROFIL PELAJAR PANCASILA (P5) DALAM KURIKULUM MERDEKA DI HOMESCHOOLING. *Conferences of Elementary Studies*, 270–279.
- Sari, E., & Noor, A. F. (2022). Kebijakan Pembelajaran Yang Merdeka: Dukungan Dan Kritik. *EDUCATIVO: JURNAL PENDIDIKAN*, 1(1), 45–53.
- Sintiawati, N., Fajarwati, S. R., Mulyanto, A., Muttaqien, K., & Suherman, M. (2022). Partisipasi Civitas Akademik dalam Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). *Jurnal Basicedu*, 6(1), 902–915. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i1.2036>
- Suaryo, A., Lurina, R. O., & Isnaini, H. (2023). Problematika Pembelajaran Bahasa Indonesia Pada Kurikulum Merdeka Di SMANegeri 1 Pamanukan, Kabupaten Subang. *Bhinneka: Jurnal Bintang Pendidikan DanBahasa*, 1(3), 101–110. <https://doi.org/10.59024/bhinneka.v1i3.187>
- Sudrajat, K. M., Muhtar, T., & Susilawati, D. (2023). Evaluasi Kurikulum Merdeka Tahun 2022 Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. *Journal of SPORT (Sport, Physical Education, Organization, Recreation, and Training)*, 7(3), 771–789. <https://doi.org/10.37058/sport.v7i3.8430>
- Sumarsih, I., Marliyani, T., Hadiyansah, Y., Hernawan, A. H., & Prihantini, P. (2022). Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(5), 8248–8258. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i5.3216>
- Suparman, T. (2020). *Kurikulum dan Pembelajaran*. CV. SARNU UNTUNG.

Yuhastina, Parahita, B. N., Astutik, D., Ghufonudin, & Purwanto, D. (2020). Peluang dan Tantangan Guru Sosiologi dalam Menghadapi Kurikulum “Merdeka Belajar” di Era Revolusi Industri 4.0. *Society*, 8(2), 732–753. <https://doi.org/10.33019/society.v8i2.234>